

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 54 tanggal 21 November 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.1. Sekretariat

i. Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas pokok :

Memberikan pelayanan administrasi keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

ii. Fungsi

- Memimpin dan pengkoordinasian sub bagian dan staf yang berada di bawah sekretariat.
- Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- Pelaksanaan urusan umum.
- Pelaksanaan urusan keuangan.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- Pengkoordinasian tugas bidang dan UPTD.
- Pemberian saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas.
- Pembinaan staf.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

iii. Rincian Tugas

- Melaksanakan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban serta urusan perbendaharaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasian.

- Melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, inventaris dan perlengkapan kantor dan urusan rumah tangga dinas.
- Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, usulan pensiun, mutasi dan peningkatan SDM pegawai.

2.1.2. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

i. Tugas

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pemagangan, sertifikasi, penyebaran informasi kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan pendataan tenaga kerja asing.

ii. Fungsi

- Pemimpin dan pengkoordinasian kasi – kasi dan staf yang berada di bawah pengawasan bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.
- Pelaksanaan program pelatihan, pemagangan, akreditasi LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta) dan sertifikasi,
- Pelaksanaan penyusunan/penghimpun informasi kerja dan bursa kerja.
- Pelaksanaan penyebaran informasi kerja dan bursa kerja,
- Pelaksanaan program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- Pelaksanaan pendataan dan perpanjangan perizinan tenaga kerja asing.
- Penghimpunan dan penyebarluasan peraturan – peraturan ketenagakerjaan.
- Pelaksanaan kerjasama dibidang ketenagakerjaan.

- Pelaksanaan pembinaan staf.
- Pemberian saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

iii. Rincian Tugas

- Koordinasi dan kerjasama dengan perusahaan dan instansi terkait dalam rangka penempatan tenaga kerja dan Pendataan TKA.
- Melakukan pembinaan Tenaga Kerja (dalam dan luar negeri) dan Tenaga Kerja Asing.
- Melaksanakan Pembinaan pengumpulan dan pengolahan informasi pasar kerja.
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perusahaan dan instansi terkait mengenai lowongan kerja dan informasi bursa kerja *on line* (BKOL).
- Melaksanakan penyebaran informasi pasar kerja dan BKOL
- Analisis rencana kebutuhan pelatihan calon tenaga kerja,
- Melaksanakan program pelatihan.
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perusahaan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program pelatihan dan pemagangan.
- Evaluasi terhadap pelatihan yang telah dilaksanakan.
- Monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja dan TKA.
- Melaksanakan pendataan terhadap lembaga pelatihan kerja swasta dan pemerintah.
- Melaksanakan Pendataan dan Pembinaan perluasan kerja luar negeri dan tenaga kerja khusus.
- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan manajemen dan instruktur LPK (Lembaga Pelatihan Kerja).

- Melaksanakan program pemagangan didalam dan diluar negeri.
- Melaksanakan uji kompetensi, akreditasi dan sertifikasi tenaga kerja.
- Melaksanakan pembinaan tenaga kerja dan tenaga kerja asing.
- Melaksanakan penempatan tenaga kerja diperusahaan.
- Melaksanakan program perluasan kesempatan kerja.
- Melaksanakan perpanjangan IMTA dan RPTKA.

2.1.3. Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial

i. Tugas

Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, syarat kerja dan penyelesaian perselisihan.

ii. Fungsi

- Memimpin dan mengkoordinasikan tugas kasi – kasi dan staf yang berada di bawah pengawasan bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial,
- Menghimpun Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial,
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dibidang Pengawasan dan Hubungan Industrial dengan pusat dan kabupaten/kota,
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja dan jamsostek, K3 dan penyelesaian perselisihan,
- Pemberian petunjuk teknis ke kabupaten/kota tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja dan

jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, syarat kerja dan penyelesaian perselisihan,

- Pelaksanaan pembinaan staf,
- Pemberian saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya,
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke perusahaan-perusahaan,
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

iii. Rincian Tugas

a) Tugas pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi.
- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial.
- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem pengupahan dan jamsostek.
- Melaksanakan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

b) Tugas pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.

- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma kerja dan jamsostek.
- Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma kerja perempuan dan anak.
- Melaksanakan pembinaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.

2.1.4. Bidang Transmigrasi

i. Tugas

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan sarana transmigrasi, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, penyuruh, pembinaan dan pengembangan usaha.

ii. Fungsi

- Memimpin dan pengkoordinasian kasi – kasi dan staf yang berada di bawah bidang transmigrasi,
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan analisis dan penyiapan data serta informasi dibidang ketransmigrasian,
- Menyiapkan calon areal transmigrasi sesuai dengan ketentuan 4L (layak huni, layak berkembang, layak usaha, layak lingkungan) dan 2C (*clear and clean*),
- Melaksanakan Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat,
- Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan bidang tugasnya,
- Melaksanakan pelatihan dan pembinaan transmigrasi,
- Melaksanakan Pembinaan staf,
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang transmigrasi,
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Penyelesaian masalah pertanahan transmigrasi.

iii. Rincian Tugas

- Melaksanakan urusan pengadaan transmigrasi serta pengadaan sarana dan prasarana transmigrasi,
- Melaksanakan penempatan dan perbekalan transmigrasi,

- Menyediakan jatah hidup warga transmigrasi di UPT Binaan,
- Melaksanakan penyiapan lahan transmigrasi serta pengelolaan permukiman transmigrasi,
- Melaksanakan penyusunan rencana teknis tata ruang permukiman dan penyediaan areal transmigrasi,
- Melaksanakan pengelolaan dan penataan lingkungan transmigrasi,
- Melaksanakan penyiapan lahan areal permukiman transmigrasi dengan ketentuan 4L dan 2C,
- Melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan usaha transmigrasi,
- Melaksanakan pembinaan mental spiritual, adat istiadat, seni budaya dan lingkungan sosial,
- Melaksanakan kerjasama antar daerah antar wilayah,
- Melaksanakan pengembangan usaha ekonomis produktif warga transmigrasi,
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang dan pembuatan laporan.

2.1.5. Bidang Bina Program, Pelaporan dan Evaluasi

i. Tugas

Bidang Bina Program, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan program, menghimpun dan memyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

ii. Fungsi

- Pemimpin dan pengkoordinasian kasi – kasi dan staf yang berada di bawah bidang Bina Program, Pelaporan dan Evaluasi.

- Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan – bahan usulan program baik APBD, APBN dan Pambantuan dari tiap – tiap Bidang dan UPTD.
- Menyiapkan dan menyampaikan usulan program baik program APBD, APBN dan Pambantuan.
- Pelaksanaan rapat – rapat koordinasi pembahasan program di daerah, pusat dan regional.
- Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi penyusunan program,
- Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program,
- Pelaksanaan penghimpunan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.
- Pembinaan staf.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

iii. Rincian Tugas

- Melaksanakan pengolahan dan pengkajian rencana program dari tiap – tiap bidang dan UPTD dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Usulan Kabupaten/Kota.
- Memberikan petunjuk teknis penyusunan program.
- Melaksanakan rapat – rapat koordinasi penyusunan program.
- Menghimpun dan mengolah usulan program dari tiap bidang, UPTD, dan Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan pembahasan Program ditingkat daerah, pusat dan regional.
- Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dinas setiap bulan, triwulan, dan tahunan.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- Menghimpun data dan informasi dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian,
- Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan.

2.1.6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)

i. Tugas

Melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan, sertifikasi dan pemagangan bagi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

i. Fungsi

- Penyusunan rencana teknis pelatihan keterampilan dan rencana kerjasama pelatihan keterampilan dengan instansi terkait, swasta dan lembaga latihan kerja atau pihak ketiga serta pelatihan swadana.
- Pelaksanaan program kegiatan pelatihan keterampilan institusional, non institusional atau mobile training unit (MTU), pelatihan produksi dan uji keterampilan.
- Pemasaran program dan fasilitas UPTD BLKI, hasil produksi dari pelatihan, jasa/konsultasi pelayanan informasi pelatihan keterampilan.
- Penyusunan program pelatihan, pemagangan, pelaksanaan kegiatan OJT.
- Penyusunan monitoring dan evaluasi program pelatihan.

ii. Rincian Tugas

- Menyusun rencana dan program pelatihan, sertifikasi dan pemagangan serta pengembangan pelatihan.
- Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan dibidang pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja ataupun tenaga kerja.

- Melaksanakan program uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja.
- Melaksanakan program pemagangan bagi siswa pelatihan pada perusahaan.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelatihan.
- Mengumpulkan informasi data pelatihan.
- Melakukan koordinasi, konsultasi, promosi, sosialisai pelatihan baik hasil produksi pelatihan, peralatan serta alumni siswa pelatihan.

2.1.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Produktivitas (BPPD)

i. Tugas

Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, melaksanakan evaluasi, pelatihan dan produktivitas serta pembinaan staff.

ii. Fungsi

- Penyiapan dan penyusunan rencana dan program pelatihan dan penyuluhan meliputi mengidentifikasi kebutuhan, menyiapkan rencana administrasi kegiatan pelatihan dan penyuluhan produktivitas.
- Menyiapkan pelaksanaan pelatihan meliputi bahan-bahan dan fasilitas, rekrutmen dan seleksi perangkat keras dan lunak pelatihan penyuluhan produktivitas.
- Pelaksanaan pelatihan, evaluasi, pelaporan, penyusunan data statistik hasil pelaksanaan pelatihan, penempatan serta pemantauan.
- Pensosialisasian arti pentingnya kemampuan manajerial untuk peningkatan produktifitas tenaga kerja.
- Penyiapan dan penambahan tenaga ahli dibidang produktivitas.

- Peningkatan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan produktivitas.
- Pemasyarakatan peningkatan kualitas dan produktivitas untuk pengembangan sumber daya manusia organisasi dan perusahaan.

iii. Rincian Tugas

- Mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan.
- Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran rutin dan belanja rutin serta pembukuan administrasi keuangan.
- Melaksanakan rencana program pelatihan dan penyuluhan produktivitas dan meningkatkan kualitas dan produktivitas untuk pembangunan masyarakat (SDM) serta organisasi/ perusahaan.
- Memberikan petunjuk serta bantuan teknis tentang peningkatan produktivitas.
- Memberikan petunjuk teknis penyimpatan peralatan dan bahan untuk kegiatan.
- Melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Hyperkes

i. Tugas

Melaksanakan kegiatan pelatihan, pengujian di bidang hygiene perusahaan, ergonomi, kesehatan kerja dan keselamatan kerja dengan menggunakan peralatan teknis dan laboratorium.

ii. Fungsi

- Pelaksanaan kegiatan penyidikan dan pengujian di bidang hygiene perusahaan, kesehatan kerja, penyerasian antara pekerja dan lingkungan kerja serta peralatan (ergonomi) dan gizi kerja serta keselamatan kerja.

- Pelaksanaan pelatihan, pemberian petunjuk serta bantuan teknologi hygiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan keselamatan kerja kepada yang bersangkutan.
- Penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengujian dan pelatihan hygiene perusahaan, kesehatan kerja serta penyusunan laporan.
- Pelaksanaan urusan tata usaha balai.

iii. Rincian Tugas

- Mengelola administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
- Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/ pembangunan.
- Mengelola rumah tangga dan perlengkapan UPTD.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.
- Menyusun rencana dan program kerja dan jadwal kegiatan.
- Melaksanakan monitoring terhadap kegiatan.
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Melaksanakan pengolahan data yang berkaitan dengan pelatihan, pengujian dan penyelidikan di bidang kesehatan kerja, higienis perusahaan.
- Melaksanakan pelayanan jasa konsultasi di bidang kesehatan kerja, higienis perusahaan dan gizi kerja.
- Memberikan petunjuk teknis serta bantuan teknis kepada pihak pengusaha dan tenaga kerja tentang perlindungan diri dari kecelakaan, penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan jenis dan sifat pekerjaan.

- Melaksanakan pemeriksaan terhadap Uji bahan, APD, peralatan listrik, sarana/ peralatan alat pemadam api ringan (APAR) di lingkungan kerja perusahaan dan sarana kerja lainnya yang berpotensi terhadap bahaya dan keselamatan kerja.
- Melaksanakan kegiatan penyidikan terhadap tenaga kerja tentang cara kerja, jenis kerja, jenis pekerjaan dan peralatan yang digunakan.
- Memberikan petunjuk dan bantuan teknis tentang ergonomic.
- Melaksanakan pelatihan ergonomi tenaga kerja dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sumber Daya yang Dimiliki

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 83 orang Pegawai Negeri Sipil. Tingkat pendidikan dan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

***Tabel 2.1**
Klasifikasi PNS dan CPNS di Disnakertrans
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana / S3	-	-	-
2	Pasca Sarjana / S2	2	-	2
3	Sarjana / S1	40	11	51
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	6	2	8
6	Diploma-I/ II	-	-	-
7	SLTA	13	7	20
8	SLTP	1	-	1
9	SD	1	-	1
	Jumlah	63	20	83

**Data sampai dengan 31 Desember 2012*

***Tabel 2.2**

**Peta Jabatan di Disnakertrans
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Eselonering**

No	Eselonering	Jabatan		Jumlah
		Terisi	Kosong	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	6	2	8
3	Eselon IV	22	-	22
8	Fungsional	9	-	9
	Jumlah	38	2	40

***Tabel 2.3**

**Klasifikasi PNS dan CPNS di Disnakertrans
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Eselonering**

No	Eselonering	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II A	1	-	1
2	II B	-	-	-
3	III A	6	-	6
4	III B	-	-	-
5	IV A	14	8	22
6	IV B	-	-	-
7	Non Eselon	34	11	45
8	Fungsional	8	1	9
	Jumlah	63	20	83

**Data sampai dengan 31 Desember 2012*

Jumlah tenaga Honorer : 36 Orang

2.3. Kinerja Pelayanan

Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2012 melalui program-program pembangunan kesejahteraan sosial, capaian kinerja sasaran yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

- Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2012 sebanyak 583.102 orang yaitu berkurang 6.532 orang dibandingkan Agustus 2011 sebanyak 589.634.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2012 mencapai 3,49 persen, lebih rendah dibanding TPT pada Agustus 2011 sebesar 3,61 persen.
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2012 sebesar 65,67 persen, menurun 2,8 persen dari 68,4 persen pada Agustus 2011.
- Persentase penyerapan tenaga kerja di sector pertanian, sector perdagangan dan industri pengolahan pada Agustus 2012 masing-masing menunjukkan peningkatan sebesar 2,67 persen, 0,87 persen dan 0,67 persen, sedangkan sektor jasa kemasyarakatan mengalami penurunan sebesar 2,3 persen dibanding Agustus 2011.
- Hingga Agustus 2012, sektor pertanian masih mendominasi dalam kontribusi penyerapan tenaga kerja. Pada Agustus 2011 terdapat 152.884 orang atau sekitar 25,9 persen tenaga kerja terserap di sector pertanian, jumlah tersebut meningkat menjadi 166.607 orang atau 28,57 persen pada Agustus 2012.
- Jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebanyak 262.058 orang atau 44,94 persen, berusaha sendiri sebanyak 136.707 orang atau 23,4 persen, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar sebanyak 53.358 orang atau 9,15 persen.

- Dilihat dari Kabupaten/ Kota TPAK tertinggi dimiliki Kabupaten Belitung sebesar 66,63 persen, sedangkan yang terendah dimiliki Kabupaten Bangka Tengah sebesar 61,09 persen. TPT tertinggi adalah Kota Pangkalpinang yaitu sebesar 5,25 persen. Sedangkan TPT terendah dimiliki oleh Kabupaten Belitung sebesar 1,76 persen.

2.3.1 Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran

Struktur ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Agustus 2012 mengalami perubahan yang berarti. Pada bulan Agustus 2012, jumlah angkatan kerja yang bekerja berkurang sebanyak 6.532 orang selama periode Agustus 2011 sampai Agustus 2012. Pada Agustus 2011 jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 589.634 orang menjadi 583.102 orang pada Agustus 2012. Sementara jumlah pengangguran turun 1.003 orang dari 22.064 orang pada Agustus 2011 menjadi 21.061 orang pada Agustus 2012.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masuk angkatan kerja dibanding dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari struktur angkatan kerja sebagaimana disajikan pada Tabel 1, TPAK pada Agustus tahun 2012 menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan Agustus tahun 2011. Persentase penurunan sebesar 2,8 persen yaitu dari 68,4 persen pada Agustus 2011 menjadi 65,67 persen pada Agustus 2012. Hal ini memberi arti bahwa pada Agustus 2012, penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang aktif secara ekonomi sebesar 65,67 persen.

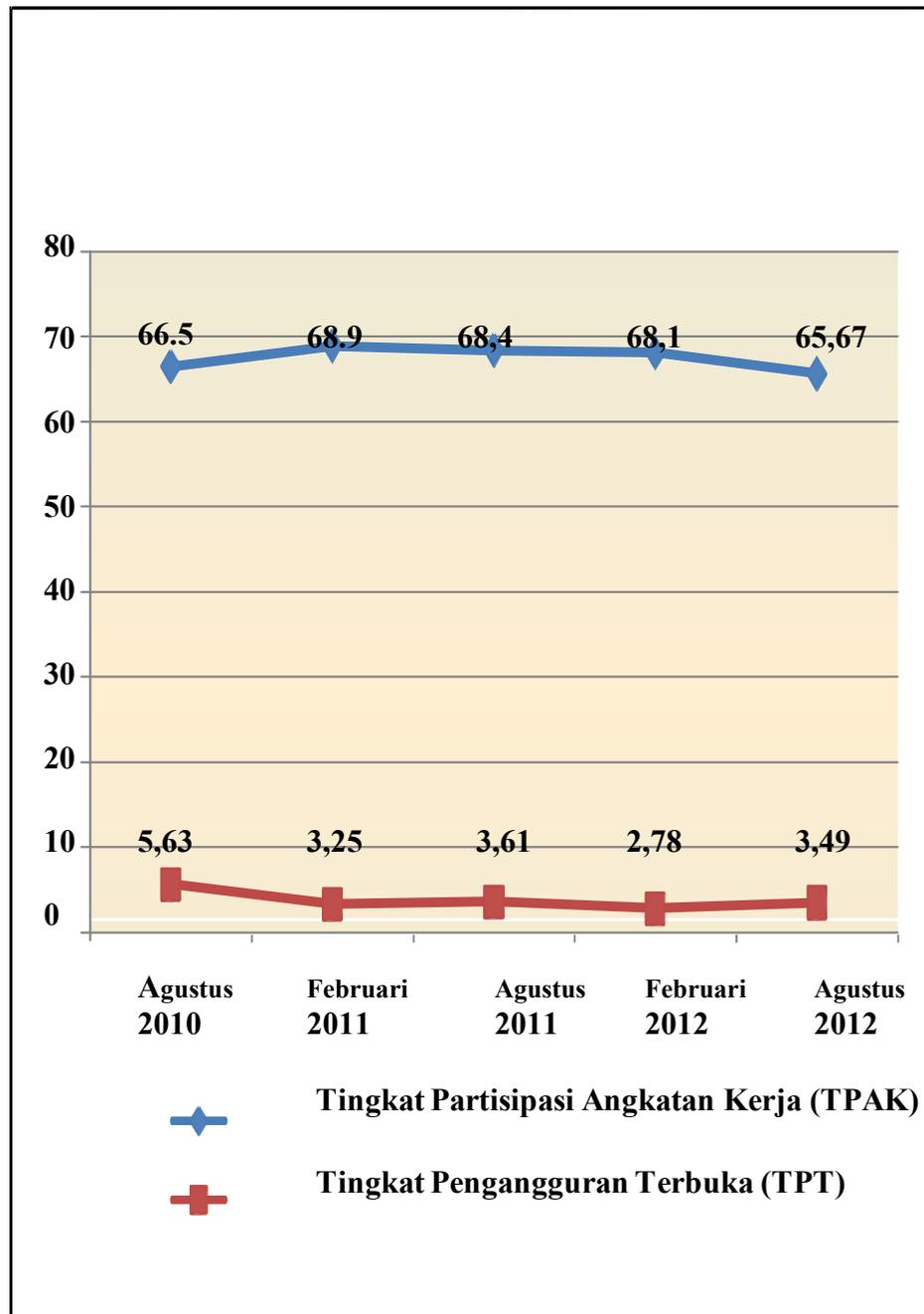
Tabel 2.4
Penduduk 15 tahun ke atas menurut Kegiatan Terbanyak,
tahun 2010 – 2012 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan Utama	Agustus 2010	Februari 2011	Agustus 2011	Februari 2012	Agustus 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan Kerja	620.063	607.437	611.698	617.631	604.163
a. Bekerja	585.136	587.721	589.634	600.488	583.102
b. Tidak Bekerja (Pengangguran Trbuka)	34.927	19.716	22.064	17.143	21.061
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,5	68,9	68,4	68,1	65,67
Tingkat Pengangguran (TPT)	5,63	3,25	3,61	2,78	3,49

Sumber : Sakernas, BPS

Persentase pengangguran terbuka pada Agustus 2012 menunjukkan penurunan disbanding Agustus 2011. TPT pada Agustus 2012 turun sebesar 0,12 persen dari 3,61 persen pada Agustus 2011 menjadi 3,49 persen pada Agustus 2012. Hal ini memberikan arti bahwa pada Agustus 2012 dari 100 angkatan kerja secara rata-rata terdapat 3 orang pencari kerja baik secara aktif maupun pasif.

Gambar I.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)



2.3.2. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama periode Agustus 2011 sampai dengan Agustus 2012 menunjukkan pola perubahan yang sama dengan keadaan sebelumnya atau terjadi perubahan persentase disetiap sektor. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor pertanian yang mengalami peningkatan disbanding Agustus 2011 yaitu dari 25,9 persen pada Agustus 2011 menjadi 28,57 persen pada Agustus 2012. Penyerapan tenaga kerja terbesar kedua terjadi pada sektor perdagangan, Hotel dan Restoran yang sama halnya dengan sektor pertanian mengalami peningkatan dibanding Agustus 2011 yaitu dari 19,0 persen pada Agustus 2011 menjadi 19,87 persen pada Agustus 2012.

Tabel 2.5
Jumlah dan Persentase Penduduk 15+ yang bekerja menurut
lapangan pekerjaan utama, Tahun 2010 - 2012
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lapangan Pekerjaan	Satuan	Agustus 2010	Februari 2011	Agustus 2011	Februari 2012	Agustus 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sektor Primer						
Pertanian	Jumlah	191.468	176.469	152.884	176.872	166.607
	%	32,7	30,0	25,9	29,5	28,57
Industri	Jumlah	26.128	32.416	32.186	29.561	35.971
	%	4,5	5,5	5,5	4,9	6,2
Perdagangan, Hotel dan Restoran	Jumlah	125.710	129.301	11.897	127.974	115.880
	%	21,5	22,0	19,0	21,3	19,9
Jasa	Jumlah	77.441	76.138	91.443	78.826	77.935
	%	13,2	13,0	15,5	13,1	13,4
Kemasyarakatan	Jumlah	164.389	173.397	201.224	187.255	186.709
	%	28,1	29,5	34,1	31,2	32,0
Lainnya	Jumlah	164.389	173.397	201.224	187.255	186.709
	%	28,1	29,5	34,1	31,2	32,0
Total	Jumlah	585.136	587.721	589.634	600.488	583.102
	%	100	100	100	100	100

Sumber : Sakernas, BPS

2.3.3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Dari tujuh pembedaan status pekerjaan pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dapat diidentifikasi 2 kelompok utama terkait kegiatan ekonomi yaitu formal dan informal. Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar dan buruh/ karyawan. Sementara kelompok kegiatan informal umumnya adalah mereka yang berstatus di luar itu.

Tabel 2.6

**Jumlah dan Persentase Penduduk 15+ yang bekerja menurut
Status Pekerjaan Utama, tahun 2010 – 2012
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Status Pekerjaan Umum	Satuan	Agustus 2010	Februari 2011	Agustus 2011	Februari 2012	Agustus 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Formal						
Berusaha Di bantu buruh tetap/buruh dibayar	Jumlah	37.099	39.099	38.978	47.008	38.932
	%	6,3	6,7	6,6	7,8	6,7
Buruh/ Karyawan	Jumlah	202.880	249.616	272.607	260.408	262.058
	%	34,7	42,5	46,2	43,4	44,9
Informal						
Berusaha Sendiri	Jumlah	154.379	121.610	131.898	126.379	136.707
	%	26,4	20,7	22,4	21,0	23,4
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/brh tidak dibayar	Jumlah	78.021	64.051	56.320	74.818	53.358
	%	13,3	10,9	9,6	12,5	9,2
Pekerja bebas	Jumlah	36.269	28.967	35.397	25.164	31.169
	%	6,2	4,9	6,0	4,2	5,3
Pekerja tidak dibayar	Jumlah	76.488	84.378	54.434	76.711	60.878
	%	13,1	14,4	9,2	12,8	10,4
Total	Jumlah	585.136	587.721	589.634	600.488	583.102
	%	100	100	100	100	100

Sumber : Sakernas, BPS

Pekerja formal dengan status buruh/ karyawan memiliki jumlah terbanyak dibandingkan dengan status pekerjaan yang lain. Pekerja formal dengan status buruh/ karyawan mencapai 262.058 orang pada Agustus 2012 atau berkurang 10.549 orang atau menurun 1,26 persen dari 46,2 persen pada Agustus 2011 menjadi 44,94 persen selama periode Agustus 2012. Sementara pekerja

dengan status berusaha dibantu buruh tetap berkurang sekitar 46 orang pada periode yang sama tetapi secara persentase naik 0,1 persen dari 6,6 persen menjadi 6,7 persen.

Selama periode Agustus 2011-Agustus 2012 kelompok pekerja informal secara umum mengalami penurunan kecuali pada mereka yang berstatus pekerja bebas dan pekerja yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar. Pekerja bebas berkurang 4.228 orang dari 35.397 orang pada Agustus 2011 menjadi 31.169 orang pada Agustus 2012 atau turun 0,65 persen dari 6 persen menjadi 5,35 persen. Terlihat bahwa pada Agustus 2012 terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada status pekerja tak dibayar (pekerja keluarga) sebanyak 6.444 orang atau terjadi peningkatan 1,24 persen jika dibandingkan dengan Agustus 2011.

2.3.4. Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran menurut Kabupaten/ Kota

Tingkat partisipasi angkatan kerja jika dilihat menurut kabupaten/ kota tampak bahwa pada bulan Agustus 2012 kabupaten yang memiliki TPAK lebih besar dari TPAK Provinsi adalah Kota Pangkalpinang (63,97 persen), Kabupaten Belitung Timur (65,4 persen) dan Kabupaten Belitung (66,63 persen), sementara untuk kabupaten/ kota lain masih di bawah TPAK provinsi.

Ditinjau dari tingkat pengangguran terbuka, tampak pada bulan Agustus 2012 Kota Pangkalpinang memiliki angka pengangguran tertinggi dibandingkan kabupaten lain, bahkan lebih tinggi dari angka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 5,25 persen. Tingkat pengangguran tertinggi kedua dimiliki Kabupaten Bangka Tengah sebesar 4,54 persen, sementara Kabupaten Belitung memiliki angka pengangguran paling rendah yaitu sebesar 1,76 persen.

Tabel 2.7
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut
Kabupaten/Kota dan Kegiatan Terbanyak, Agustus 2012
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Penduduk 15+				TPAK	TPT
	Bekerja	Pengangguran	Angkat Kerja	Bukan Angkatan Kerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
Bangka	130.059	3.710	133.76	74.470	62,46	2,77
Belitung	79.430	1.425	80.855	38.356	66,63	1,76
Bangka Barat	81.732	3.217	84.949	44.897	62,95	3,79
Bangka Tengah	73.428	3.489	76.917	43.271	61,09	4,54
Bangka Selatan	80.044	3.187	83.231	44.809	62,51	3,83
Belitung Timur	53.502	1.329	54.831	26.982	65,40	2,42
Pangkalpinang	84.907	4.704	89.611	43.117	63,97	5,25
Total	583.102	21.061	604.163	315.902	63,38	3,49

Sumber : Sakernas, BPS

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan, antara lain masih belum berfungsinya Balai Latihan Kerja (BLK), secara maksimal, masih belum terpenuhinya kebutuhan instruktur di BLK, masih perlunya peningkatan penerapan peraturan ketenagakerjaan, yang disinkronisasikan dengan kebijakan ketenagakerjaan pusat dengan

kebijakan/peraturan daerah, masih lemahnya lembaga hubungan industrial, terbatasnya kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan, masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja, masih banyaknya anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, masih rendahnya kompetensi TKI yang bekerja di luar negeri, masih tingginya tenaga kerja asing (TKA), rendahnya perlindungan bagi pekerja di luar negeri, banyaknya kesempatan kerja di dalam dan luar negeri yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja daerah akibat ketidaksesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja.

Beberapa permasalahan di bidang ketransmigrasian yang masih dijumpai, diantaranya adalah terkait tidak seimbangannya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi, masih banyak lokasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum *clear and clean*, masih rendahnya partisipasi daerah dan swasta dalam pembangunan transmigrasi, masih banyaknya lokasi transmigrasi yang tidak berkembang, rendahnya kualitas sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi, serta belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi.

Keberadaan sumber daya Disnakertrans, yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, menjadi factor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Disnakertrans dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Seluruh sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan. Sumber daya itu harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.

Salah satu contoh adalah potensi SDM yang berlatar belakang pendidikan yang sangat memadai.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan nasional dan Daerah, maka Pengembangan Pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kemnakertrans dan Disnakertrans adalah:

1. Penetapan Kebijakan dan Peraturan

Kemnakertrans akan menetapkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang dan norma, standar, prosedur dan criteria (NSPK) bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan ditetapkan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi

Dalam penyelenggaraan tugas bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Kementerian akan menjalin kerjasama dengan semua instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah, juga melibatkan pihak swasta dan masyarakat (*stakeholders*). Koordinasi dengan memadukan/mengintegrasikan menyeraskan dan menyelaraskan berbagai *stakeholders* yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran menjadi prioritas utama.

3. Fasilitasi Program dan Pendampingan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Kemnakertrans memfasilitasi program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program, *monitoring* dan evaluasi

pelaksanaan. Kemnakertrans akan memberikan kegiatan pendampingan melalui pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Program-program pendampingan diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, pengembangan kewirausahaan, dan mendorong peransertaaktif masyarakat (*participatory process*).

4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM

Kelembagaan Kemnakertrans akan disesuaikan dengan kebutuhan. Peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, sehingga apasitas kelembagaan dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuan organisasi.

5. Meningkatkan Kualitas Penerapan *Good Governance*

Penyelenggaraan tugas di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan dilaksanakan sejalan dengan prinsip *good governance*. Penyelenggaraan ini akan menghasilkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif, efisien dan responsive untuk memperoleh opini pelaporan yang wajar tanpa pengecualian (WTP).

6. Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri

Selama ini berbagai kerja sama luar negeri telah dibangun dan dibina, baik secara bilateral maupun multilateral dan akan terus ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Mengingat masih adanya berbagai permasalahan yang terkait dengan isu ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di luar negeri, maka kerja sama yang telah dirintis selama ini, antara lain dengan *International Labour Organization* (ILO) dan *International Organization for Migration* (IOM) serta lembaga internasional lainnya akan terus ditingkatkan.

7. *Pengarusutamaan Gender*

Dalam dinamika hak asasi manusia (HAM), pengarusutamaan *gender* (PUG) adalah merupakan wawasan salah satu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian. Strategi ini dilaksanakan melalui pengintegrasian *gender* ke dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran, baik ditingkat pusat maupun daerah sehingga pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kemnakertrans akan melanjutkan upaya penerapan pengarusutamaan *gender* secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* dalam bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian.

8. *Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan*

Sebagai upaya untuk menjamin agar visi, misi, dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, maka Kementerian melaksanakan pengendalian dan pengawasan, melalui SPIP.

9. *Monitoring dan Evaluasi*

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kemnakertrans, serta tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan dan strategi yang dilaksanakan dalam bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, maka diperlukan kegiatan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dalam

upaya penyempurnaan dan penajaman pelaksanaan program dan kegiatan.

10. Perencanaan Tenaga Kerja

Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja merupakan amanat dan implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Rencana Tenaga Kerja ini dirancang untuk mampu mengakomodir kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Perencanaan Tenaga Kerja Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota ini dapat direview secara berkala untuk menyelaraskan berbagai kebijakan dan program yang ada terhadap perubahan dan perkembangan baru, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan saat itu.